




## Bab 4

### Analisis Pendorong Pembangunan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Utara melalui Pendekatan *Tourism Satellite Account* (TSA) dan SWOT

Penulisan sitasi untuk bab ini  
Koleangan, C.A.P, J. Budhi, dan A. Archangela (2023), ' Analisis Pendorong Pembangunan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Utara melalui Pendekatan *Tourism Satellite Account* (TSA) dan SWOT', dalam Widiani, A., G.Hadiwidjaja, M. Sapulette dan E. Simarmata (eds.) *Membangun UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia Timur*. Jakarta: ERIA dan Kementerian Perdagangan, pp.50-73.



# Analisis Pendorong Pembangunan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Utara Melalui Pendekatan *Tourism Satelite Account (TSA)* dan SWOT

Christoforus Adri Pieter Koleangan, Jeane Budhi, dan Amanda Archangela

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan *tourism satelite account (TSA)* dan analisis *strenght, weakness, opportunity and threat (SWOT)*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber dari wawancara, *focus group discussion (FGD)*, dan literatur-literatur. Kesimpulan kajian ini adalah *supply* produk/jasa sektor pariwisata yang masih dapat dioptimalkan oleh UMKM Sulut sebesar Rp10.872 triliun. Sinergitas antara pemerintah, UMKM, masyarakat dan institusi Pendidikan dapat meningkatkan kapasitas *supply* pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut. Dalam kapasitas penuh, sektor pariwisata akan menjadi penyumbang penyerapan tenaga terbesar di Sulut. Tidak ditemukan adanya Rencana Induk Pengembangan yang disusun Pemerintah Sulut untuk sektor ekonomi kreatif. Ditemukan adanya permasalahan dalam legalitas, permodalan, pemasaran, dan keterampilan manajerial pada UMKM sektor ekonomi kreatif yang menghambat pengembangan sektor. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk menekan penyebaran Covid-19. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi bagi UMKM, Pemerintah, dan masyarakat Sulawesi Utara untuk dapat membangun kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM, Pemerintah, Masyarakat

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak keberagaman mulai dari kebudayaan, keindahan alam, hingga variasi bahasanya. Keberagaman yang ada tersebut menjadi daya tarik pariwisata tidak hanya bagi masyarakat lokal namun juga mancanegara. Selanjutnya, selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, Kemendikbud/Baparekraf yang memiliki visi sepanjang tahun 2020-2024 yaitu “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju memiliki makna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di waktu yang akan datang harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut harus turut mempertimbangkan aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya juga aspek permintaan wisatawan. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu melakukan penyesuaian pada perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dunia, agar tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing berarti bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Begitu pula dalam sektor pariwisata, Indonesia diharapkan mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, maupun Filipina.

Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan memiliki arti bahwa pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat dinikmati sampai dengan generasi berikutnya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia juga harus turut mengedepankan kearifan lokal di mana dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu identitas diri bangsa. Orisinalitas Indonesia ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Sejak tahun 2015, pendapatan devisa dari sektor pariwisata berada di urutan keempat setelah sektor minyak dan gas, batu bara dan kelapa sawit (Luthfia, 2021). Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, terjadi peningkatan konsumsi oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Total konsumsi pariwisata internal tahun 2019 mencapai 1.734 triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 1.259 triliun rupiah, di mana secara rata-rata naik sebesar 37,7%. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, diketahui nilai konsumsi pariwisata internal yang terdiri dari pengeluaran wisatawan domestik sebesar 1.455 triliun rupiah (83,91%) dan pengeluaran pariwisata mancanegara sebesar 279 triliun rupiah (16,09%). Pada tahun 2019 ini pula, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk memajukan 10 destinasi wisata nasional yang sering disebut sebagai “10 Bali Baru Indonesia” Salah satu yang sedang dikembangkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Minahasa Utara di Sulawesi Utara (Widarsi, 2019).



Akan tetapi, ketika Covid-19 menjadi pandemi global, maka setiap negara melakukan pembatasan pergerakan sosial masyarakat, termasuk pembatasan sosial. Hal ini sangat berdampak pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat ini adalah penurunan wisatawan yang sangat tajam, baik wisatawan domestik maupun mancanegara seperti yang tergambar dalam data statistik (Badan Pusat Statistik, 2022a). Wisatawan sudah tidak lagi sebebaskan seperti pada masa sebelum pandemik. Pada masa ini, wisatawan tidak dapat bepergian tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan termasuk kebijakan suatu daerah yang berkaitan dengan situasi pandemik ini. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulut mengalami penurunan yang sangat drastis dan memasuki tahun 2021, dari data yang ada sampai dengan bulan Desember kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut hanya mencapai 15.239 orang atau menurun sebesar 33,83% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulut hanya mencapai 38.270 orang. Angka ini sangat memprihatinkan, karena bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2019, angka tersebut hanya mencapai 29% saja.

Situasi ini berdampak langsung pada kondisi perekonomian daerah Sulawesi Utara, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penutupan banyak tempat wisata dan usaha ekonomi kreatif memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang terkait. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara mencatat, bahwa sebanyak 1.500 pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 3.000 dirumahkan karena pandemi, di mana rata-rata merupakan pekerja di bidang perhotelan. Hal ini terindikasi pula pada pertumbuhan ekonomi Sulut yang turut menurun hingga mencapai -0,99% di tahun 2020 dan 4,16% pada tahun 2021. Kondisi ini turut berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara di mana data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2022b) menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulut pada bulan Maret 2021 mencapai 7,7% dengan jumlah 196.35 ribu orang. Angka ini bertambah 0.5 ribu orang dibanding September 2020 dan bertambah 3.98 ribu orang dibanding Maret 2020.

Kondisi ini menciptakan kegelisahan, ketakutan dan rasa tidak nyaman di kalangan masyarakat, begitu pula dengan pemerintah. Ketidaknyamanan ini harus dikelola dengan bijaksana agar situasi yang tidak menguntungkan dapat dihindari semua pihak. Oleh karena itu merupakan suatu kegagalan yang besar, apabila kita berpuas dan berdiam diri dengan kondisi saat ini (Dua, 2008). Satu ayunan atau langkah nyata kecil perlu dilakukan dalam rangka merajuk kembali pembangunan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kajian yang diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang diperlukan terkait dengan pembangunan kembali UMKM Sulut di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa pandemik covid-19. Hal-hal yang bersifat konstruktif dan solutif menggunakan pendekatan *Tourism Satellite Account* (TSA) dan analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*).

Sebelumnya telah pernah dilakukan penelitian yang mengangkat topik yang kurang lebih mirip, yaitu strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19 oleh Pambudi *et al.*, (2020) dan pengembangan ekonomi kreatif sektor UMKM dimasa pandemik Covid-19 oleh Hasan *et al.* (2021). Akan tetapi, dari hasil penelusuran pustaka, belum ditemukan adanya penelitian yang menggunakan alat analisis TSA dan SWOT sebagai indikator penelitiannya. Kedua alat analisis

ini digunakan agar dapat diperoleh gambaran jelas secara makro dan mikro tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, gambaran ini yang selanjutnya dapat dikaji penulis sehingga bisa dirumuskan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk membangun kembali UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulut.

## 1.2. Pokok Permasalahan Kajian

Proses perumusan masalah berangkat dari cara pandang di mana esensi pembangunan tidak hanya dikaji dari perspektif fenomena ekonomi semata, tetapi juga dari proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, perilaku, dan kelembagaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta pengalaman yang dirasakan langsung oleh penulis (sebagai masyarakat Sulut). Maka, penulis merumuskan pokok permasalahan UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara sebagai berikut: Hal-hal apa yang diperlukan untuk membangun kembali UMKM Sulawesi Utara di sektor pariwisata pada masa pandemik Covid-19 dengan TSA dan analisa SWOT?

Analisis melalui TSA ini digunakan untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian. Hasil yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dengan SWOT agar dapat diketahui potensi kekuatan, peluang, serta apa saja ancaman yang dapat menghambat pembangunan kembali kedua sektor ini di Sulut.

## 2. Profil UMKM Sulawesi Utara

Sebelum mengetahui potensi dan hambatan UMKM pada kedua sektor ini, maka perlu dilakukan pengkajian tentang beberapa profil yang berkaitan dengan UMKM Sulawesi Utara di bawah ini.

### 2.1. Profil UMKM dan Perkembangan Ekonomi Sulawesi Utara

Jumlah UMKM yang terdaftar berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara ada sebanyak 58.871 unit dan menyerap 120.218 tenaga kerja (11,33% dari total pekerja di Sulawesi Utara). Dunia usaha Sulawesi Utara pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Jumlah pelaku usaha mikro di Sulut mencapai lebih dari 385 ribu unit usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021, 6 Juli) (Tabel 4.1 dan Gambar 4.1) tercatat jumlah rekening pinjaman UMKM Sulut di bank umum sebanyak 1.158.473 orang. Dengan besaran pinjaman di tahun 2021 hanya mencapai Rp.130.668.193.279.363 (39,2%), di mana pinjaman UMKM Sulut ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman Non-UMKM yang mencapai Rp333.601.510.411.759 (60,8%).

### 2.2. Profil Sulawesi Utara Dalam Angka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2022b) diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2019 mencapai 5,65 %, kemudian mengalami penurunan drastis mencapai angka -0,99 % di tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2021 terjadi pembalikan arah dari negatif ke arah positif mencapai 4,16%. Tren pembalikan arah merupakan

tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sudah menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kinerja ekonomi walaupun belum terasa sampai ke jenjang masyarakat kecil yang paling merasakan sakitnya keterpurukan ekonomi akibat pandemik Covid-19 ini.

### 2.3. Profil Sektor Pariwisata Sulawesi Utara

Pada Januari 2022, pariwisata Sulut menunjukkan sudah mulai ada sedikit peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2022a) diketahui bahwa jumlah wisman yang datang ke Sulawesi Utara melalui bandara Sam Ratulangi pada bulan Januari 2022 tercatat sebanyak 466 orang. Jumlah ini menurun 54,98% dibandingkan bulan Desember 2021. Selanjutnya apabila data pada bulan Januari 2021 dibandingkan dengan data pada bulan Januari 2022, terdapat peningkatan sebesar 7,62%. Wisatawan mancanegara ini masih didominasi oleh warga Tiongkok yakni sebanyak 227 orang (48,71 %) dan warga Rusia pada posisi kedua sebanyak 109 orang (23,39%).

Selain itu, diperoleh data bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sulawesi Utara pada bulan Januari 2022 mencapai 37,22%, di mana angka ini mengalami penurunan sebesar 11,94 poin (24,29%) dibandingkan dengan TPK pada bulan Desember 2021 yang mencapai 49,16%. Selanjutnya, data rata-rata lama menginap tamu (RLMT) hotel berbintang pada bulan Januari 2022 mencapai 5,94 hari, angka ini meningkat 3,59 poin. Secara keseluruhan, RLMT bulan Januari 2022 meningkat 0,03 poin (1,72 hari) bila dibandingkan dengan bulan Desember 2022 yang hanya mencapai 1,69 hari.

### 2.4. Profil Sektor Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara

Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di Sulawesi Utara mencapai 62.734 UMKM. Pelaku usaha ini terdiri atas PT sebanyak 339 (0,54 %) , CV sebanyak 237 (0,38%), ijin khusus sebanyak 2905 (4,6%), badan usaha lain sebanyak 66 (0,1%) dan tidak berbadan usaha sebanyak 59.187 (94,35 %). Sementara itu, struktur ekonomi kreatif yaitu tersusun oleh sektor kuliner (75,77%), *fashion* (13,53 %), kriya (6,72%), penerbitan (1,49 %), musik (1,12 %), fotografi (0,63 %), seni rupa (0,20), seni dan pertunjukan (0,18%), TV dan radio ( 0,11%), arsitektur (0,08 %), periklanan (0,06 %), aplikasi dan gim (0,06 %), film, animasi dan *video* (0,05 %), desain produk (0,02%), dan desain komunikasi visual dan desain interior (0%). Dari 16 sektor ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Utara, terdapat tujuh sektor dominan, yaitu kuliner, *fashion*, kriya, penerbitan, musik, fotografi, dan seni rupa.

## 3. Metode

### 3.1. Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini mendeskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat kajian ini berlangsung (Noor, 2011). Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai alat analisis yang digunakan beserta indikator pengukurannya.

Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kategori, pemerintah (Dinas Parekraf Sulut); pelaku usaha UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang direpresentasikan oleh 13 narasumber dari usaha kuliner, perhotelan, *diving club*, manufaktur makanan, *jasa tour and travel*, usaha desain, *fashion*, *content creation*, serta perwakilan beberapa asosiasi terkait ekonomi kreatif dan UMKM; masyarakat dan akademisi (tiga narasumber).

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Tourism Satellite Account* (TSA) untuk sektor pariwisata dan SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) untuk ekonomi kreatif. Pariwisata merupakan sektor yang cukup penting bagi perekonomian. Untuk itu, diperlukan seperangkat alat analisis untuk mengukur kinerja serta peran sektor pariwisata dalam mendorong perekonomian. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) telah menyusun dan mengembangkan *tools* yang menjadi panduan di berbagai negara, yaitu *Tourism Satellite Accounts* atau TSA (Badan Pusat Statistik, 2022a; The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2010).

TSA adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan yang terkait dengan pariwisata dan mengukur kontribusi pariwisata dalam perekonomian. Struktur TSA disusun berdasarkan hukum ekonomi yaitu keseimbangan antara belanja (*demand*) dan penyediaan (*supply*) barang dan jasa oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kerangka kerja TSA ini, ruang lingkungannya dipersempit di Sulawesi Utara dan mencatat aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Selanjutnya akan dilakukan pula analisis SWOT yang merupakan suatu teknik perencanaan hal yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu bidang atau sektor. Adanya analisis SWOT ini akan membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan, di mana melalui analisis ini, dapat diketahui potensi kekuatan sektor, kelemahan, peluang yang ada, serta apa saja ancaman yang dapat menghambat.

### 3.2. Indikator Pengukuran

Indikator yang digunakan adalah *tourism direct gross domestic product* (TDGDP) yang dapat mengukur bagian dari PDB yang mencakup pajak produk neto dan impor serta analisis potensi dan hambatan di kedua sektor terkait (Obst, 2018). Dalam kajian ini, penulis hanya menggunakan alat analisis TGGDP dikarenakan keterbatasan data yang tersedia tetapi tidak mengurangi esensi dan tujuan kajian ini. Adapun rumusnya ditunjukkan oleh persamaan (1).

$$\text{Kontribusi TDGDP} = \frac{\text{TDGDP}}{\text{GDP}} \quad (1)$$

Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap beberapa sektor lapangan usaha yang terkait dengan industri pariwisata Sulut sesuai konkordansi TSA.

### 3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer (wawancara dan FGD) serta data sekunder. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMK RI, Bank Indonesia, Otoritas Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, TSA UNWTO, buku, serta artikel-artikel ilmiah pendukung.

## 4. Hasil Kajian

### 4.1. Potensi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara

Mengacu pada profil yang telah diuraikan di atas dan hasil pembahasan dalam *Focus Group Discussion* yang diadakan pada 04 November 2021, maka penulis memulai mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh UMKM Sulawesi Utara dan menggolongkannya ke dalam dua kategori yaitu potensi yang bersumber dari dalam (internal) dan potensi yang bersumber dari luar (eksternal).

Potensi internal antara lain masih adanya dorongan yang kuat berupa kemauan/semangat untuk bangkit lagi dari kondisi saat ini (berdasarkan hasil wawancara beberapa UMKM). Tidak hanya itu, UMKM Parekraf Sulut menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Selain itu, umumnya bisnis UMKM parekraf Sulut menggunakan modal relatif kecil dan bersifat terbuka (mudah bergaul). Selain itu, kebanyakan investor di Sulawesi Utara adalah investor lokal, sehingga perkembangan parekraf di Sulut semakin kuat, didukung dengan *digital marketing* yang sementara dikembangkan yakni: *cashless payment*, klik kios, dan antar jo.

Adanya penyesuaian *new normal* yang mulai dilakukan melalui penggantian konsep usaha, beberapa usaha baru yang sedang dikembangkan adalah café atau rumah kopi dan *cake*, rumah makan Jepang dan Korea yang memiliki banyak peminat di Sulut, fokus bergeser ke pasar lokal, yakni masyarakat Sulut sendiri, adanya pengembangan produk kopi origin Sulut yang diharapkan dapat mengangkat nama daerah Sulut agar lebih dikenal masyarakat luas, tersedianya media pemasaran menggunakan online melalui website dan *e-commerce* seperti Tokopedia, dll. dan *offline* di toko *Souvenir/oleh-oleh*, juga *reseller* dan spot-spot pariwisata. Adanya rencana pengembangan agroforesti kopi dimana penanaman kopi akan digandengkan bersama hutan (tetap menjaga kelestarian alam) menuju wisata kopi (dari proses pasca panen hingga proses roastingnya). Selain itu, sedang dipersiapkan juga kafe untuk wisata kopi ini dan juga mobil kafe yang dirancang agar lebih aktif menjangkau daerah spot wisata. Untuk *stakeholder* pariwisata kopi ini juga turut membuka potensi lima profesi baru: pengusaha tani (diperlukan *entrepreneur* millennial untuk ikut bergabung), profesi *grader*, dan barista.

Selain potensi internal, diketahui ada pula potensi eksternal yang turut mendukung, yaitu sumber daya alam mencakup wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya. Keberadaan taman nasional, seperti Taman Nasional Laut Bunaken dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone didukung dengan letak dan posisi geografis Sulawesi Utara, sebagai wilayah paling utara Indonesia dan langsung berbatasan dengan Lautan Pasifik, sehingga memiliki potensi yang besar sebagai pintu gerbang keluar-masuknya kegiatan ekonomi regional dan global. Danau Tondano yang indah



dikelilingi daerah pegunungan yang rata-rata mempunyai ketinggian 700 M sehingga bentuknya menyerupai sarang burung udara pegunungan yang sejuk. Gunung Lokon dan Mahawu, kedua gunung ini mempunyai kawah yang amat indah. Kawasan konservasi perairan dengan luas 79.065 ha yang terdiri dari dua bagian terpisah yaitu bagian utara meliputi lima pulau masing-masing yakni Pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua, Mantehage dan Pulau Nain, serta wilayah pesisir Desa Molas, Desa Meras, Tongkaina dan Tiwoho, serta bagian selatan meliputi pesisir desa-desa, yaitu Desa Popo, Teling, Kumu, Pinasungkulan, Rap-rap, Sondaken, Wawontulap dan Poperang. Provinsi Sulut juga memiliki berbagai objek wisata budaya antara lain 144 “Waruga” kuburan batu dari nenek moyang orang Minahasa, enam museum, 82 situs purbakala, 49 bangunan bersejarah, dan 33 makam bersejarah.

Sulut mempunyai berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Bandara International (Sam Ratulangi Manado) dan tiga bandara perintis (Miangas, Melongguane, Sangihe); dari segi Komunikasi terdapat 1.443 desa/kelurahan yang sudah dapat menerima sinyal 4G/LTE; terdapat 41 hotel berbintang dengan jumlah kamar 3.659 unit dan 4.978 tempat tidur serta 229 hotel non bintang dengan jumlah kamar 4.836 dan 6.421 tempat tidur; terdapat juga 355 restoran; dan tujuh desa wisata.

Selain potensi di atas, potensi eksternal dapat juga bersumber dari pemerintah yaitu adanya pembukaan penerbangan luar negeri langsung Narita, Jepang-Manado; Tiongkok-Manado; Davao-Manado; terdapat juga 300 objek destinasi wisata yang siap dikunjungi wisatawan; telah disetujuinya pendirian Politeknik Pariwisata Sulut.

Tidak hanya itu, cukup banyak tempat wisata yang telah tersertifikasi CHSE (*cleanliness, health, safety, and environment sustainability*). Ada juga upaya untuk mengembangkan ekowisata mangrove dimana Sulut memiliki area ekosistem mangrove seluas 12.036,29 ha. Potensi eksternal lainnya yang juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan parekraf Sulut yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Likupang yang merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas.

Selain itu, Manado juga menjadi salah satu pintu masuk pengelolaan wisatawan asing dalam rangka *business visa, working visa* dan *student visa* yang juga akan dipersiapkan untuk menemani Bali untuk *tourist visa*. Adanya pengembangan *cotourism (collaborative tourism)* dan tersedianya fasilitas promosi produk UMKM berupa Gedung Paradise Promotion Product Centre (P3C), tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), fasilitas UPTD Balai Diklat UMKM, fasilitas bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, fasilitas pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat. Semua potensi di atas turut didukung lewat adanya penyelenggaraan *event-event* berskala nasional dan internasional setiap tahunnya seperti Festival Bunaken, Tondano, dan Tomohon *International Flower Festival*.

Potensi-potensi di atas makin diperkuat dengan karakteristik masyarakat Sulut yang terbuka terhadap perkembangan dan kesediaan menerima hal-hal yang baru. Data Indeks Pembangunan Manusia Sulut yang berada di atas rata-rata nasional (72,29) yaitu sebesar 73,30 dan berada pada urutan keenam tertinggi secara nasional (2021). Dukungan nilai budaya dan perilaku masyarakat Sulut antara lain budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* ‘manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiaikan manusia’, budaya *mapalus* ‘gotong-royong’, dan budaya *torang samua basudara* ‘kita semua bersaudara’. Juga diketahui bahwa Sulut



mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,62% yang diharapkan akan membantu percepatan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2022b).

#### 4.2. Hambatan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara

Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM Parekraf Sulut dapat bersumber dari berbagai pihak, yang pertama hambatan bersumber dari pemerintah, antara lain kurangnya pemahaman teknis pemeriksaan kelembagaan dan UMKM bagi aparatur pembina kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Kurangnya kegiatan *monitoring* dan evaluasi, kurangnya pemahaman teknis tentang aturan-aturan berkaitan dengan pengawasan terhadap UMKM. Koordinasi antar-dinas terkait masih kurang atau belum bersinergi (terlihat dari adanya perbedaan data jumlah UMKM). Sistem birokrasi yang masih rumit dan belum berbasis digital. Belum adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Ekonomi Kreatif Sulut. Pembangunan KEK Likupang terhambat, karena para investor masih menunggu situasi ekonomi membaik. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas kebersihan kota dan kabupaten terkait sampah dan pengelolannya, khususnya di destinasi wisata. Masih minimnya ketersediaan air bersih di Pulau Bunaken. Infrastruktur jalan dan lampu penerangan jalan perlu perhatian. Minimnya ketersediaan toilet umum yang berstandar di dalam kota Manado. Toilet umum di destinasi wisata pada umumnya masih di bawah standar.

Selain Pemerintah, hambatan juga dapat bersumber dari masyarakat lokal sendiri yaitu kurangnya inisiatif masyarakat desa untuk membangun ekonomi melalui pengembangan desa wisata dan desa wisata tidak dikelola secara profesional. Tidak hanya itu, ekspansi pesat dari gerai-gerai internasional yang semakin menjamur, khususnya di kota Manado, turut menghambat usaha gerai-gerai lokal yang sedang bertumbuh.

#### 4.3. Analisis TSA pada Sektor Pariwisata Sulawesi Utara

Dari hasil perhitungan (Tabel 4.1) yang dilakukan dapat dijelaskan keseimbangan antara *supply* dan *demand* pada sektor pariwisata pada tahun 2021 (dalam triliun Rupiah):

- Sisi *supply*, penyediaan produk/jasa domestik Rp 32.343
- Sisi *demand*, konsumsi produk/jasa pariwisata internal Rp 21.471
- *Supply* produk/jasa dikonsumsi non-wisatawan Rp 10.872 (33,61%)

Nilai tambah yang terjadi akibat aktivitas dari sektor pariwisata di Sulawesi Utara di tahun 2020 mencapai Rp 20.302,10 Triliun (TDGDP) dengan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut terhadap GDP sebesar 23,04 %.

UMKM Sulut masih dapat memanfaatkan ketersediaan *supply* sebesar 33,61%. Kapasitas *supply* tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 34.787 triliun yang artinya apabila Pemerintah, UMKM, masyarakat, dan institusi pendidikan dapat bersinergi, maka sangat memungkinkan untuk tahun mendatang dapat mencapai kapasitas seperti yang terjadi pada tahun 2020 bahkan lebih. Kapasitas ini belum termasuk kapasitas KEK Likupang apabila telah beroperasi. Sejauh ini,

sektor pariwisata telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 268.268 orang (41,92%) dari total penyerapan tenaga kerja UMKM (639.962 orang). Apabila sektor ini bekerja dalam kapasitas penuh maka diperkirakan sektor pariwisata ini mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 90.675 orang sehingga total penyerapan tenaga kerja menjadi 358.943 orang (56,1%). Dengan demikian, sektor ini akan menjadi penyumbang penyerap tenaga kerja terbesar di Sulut.

Tabel 4.1: Ukuran Kontribusi Pariwisata Sulawesi Utara 2020 (Triliun Rupiah)

Produk		Industri Pariwisata							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
No.		Jasa Akomodasi dan makan minum	Jasa transportasi dan pergudangan	Jasa informasi dan komunikasi	Jasa keuangan dan asuransi	Jasa real Estate	Jasa pendidikan	Jasa perusahaan	Aktivitas pariwisata lainnya
1	Jasa akomodasi dan makan minum	1,518							
2	Jasa transportasi dan pergudangan		6,798						
3	Jasa informasi dan komunikasi			4,846					
4	Jasa keuangan dan asuransi				958				
5	Jasa real Estate					3,328			
6	Jasa pendidikan						2,456		
7	Jasa perusahaan							1,518	
8	Jasa lainnya								75
TOTAL OUTPUT (harga konstan 2010)		1,518	6,798	4,846	958	3,328	2,456	1,518	75
TOTAL NILAI TAMBAH BRUTO (harga konstan 2010)		1,320	5,878	3,675	721	2,764	1,898	1,326	72

...(berlanjut pada halaman berikutnya)

...(lanjutan Tabel 1)

Produk		Industri Pariwisata			
		P9	P10	P11	P12
No.		Jumlah	Penyediaan Domestik (atas harga pembeli)	Konsumsi Pariwisata Internal	Rasio Konsumsi Pariwisata Internal (%)
1	Jasa akomodasi dan makan minum	1,492	1969	1492	75.77
2	Jasa transportasi dan pergudangan	6,798	12,402	6,798	54.81
3	Jasa informasi dan komunikasi	4,846	5747	4,846	84.32
4	Jasa keuangan dan asuransi	958	1357	958	70.6
5	Jasa real Estate	3,328	4473	3,328	74.4
6	Jasa pendidikan	2,456	4025	2,456	61.02
7	Jasa perusahaan	1,518	2291	1,518	66.26
8	Jasa lainnya	75	79	75	94.94
TOTAL OUTPUT (harga dasar)		21,471	32,343	21,471	66,39%
TOTAL NILAI TAMBAH BRUTO (harga dasar)		17,654			

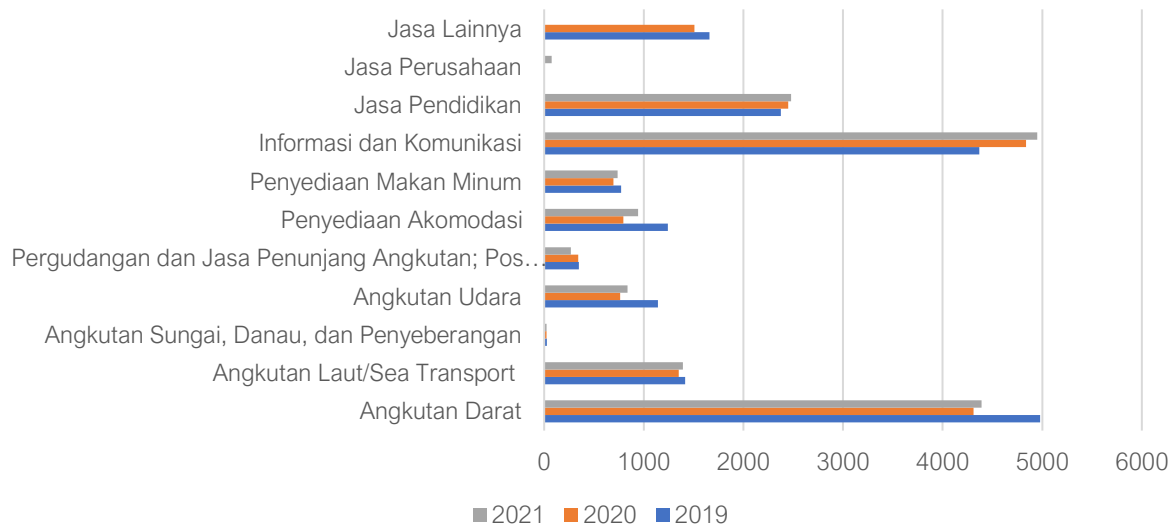
**Indikator Makroekonomi Pariwisata Sulut 2020:**

Nilai tambah bruto langsung Pariwisata (TDGVA)	17,654.00
Pajak produk neto	2,648.10
Produk domestik bruto langsung Pariwisata (TDGDP)	20,302.10
Produk domestik bruto	88,126.37
Kontribusi Pariwisata Sulut (%)	
Proporsi TDGDP = TDGDP/GDP	23.04

Sumber: Diolah penulis

Selanjutnya, akan dibahas per sektor yang terkait dengan industri pariwisata di Sulut. Analisis ini didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019-2021 yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.

**Gambar 4.1: PDRB Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (2022b)

#### 4.3.1. Angkutan Darat, Laut, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Udara

Dari data yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa di sektor angkutan ini mengalami angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan baik pada semua jenis angkutan, khususnya untuk angkutan darat dan udara, di mana ada penurunan yang cukup signifikan. Hal ini akibat dari berbagai pembatasan yang dilakukan dampak pandemik Covid-19. Di tahun 2019, angkutan udara mencapai 4.977,46 kemudian turun menjadi 4.309,48 miliar rupiah, begitu pula dengan angkutan udara yang awalnya berada pada 1.141,54, lalu turun tajam ke 762,76 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 terlihat adanya peningkatan pada semua jenis angkutan walaupun belum terlalu signifikan.

#### 4.3.2. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir

Selama tahun 2019 sampai dengan 2020 terlihat tidak ada perubahan yang signifikan atau dapat dikatakan PDRB sektor ini cenderung cukup stabil. Akan tetapi, di tahun 2021, terjadi penurunan cukup besar yang dari awalnya di angka 343,56 (2020) turun menjadi 268,65 miliar rupiah.

#### 4.3.3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka pada sektor ini, dimulai pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, lalu angka naik kembali di tahun 2021. Pada penyediaan akomodasi, angka berada pada 1.242,08 lalu turun di tahun 2020 ke 796,59 selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2021 mencapai 944,31 miliar rupiah. Demikian pula dengan penyediaan makan minum yang dibuka pada angka 771,81 di tahun 2019, lalu terjadi

penurunan hingga 694,58 miliar rupiah, akan tetapi kembali naik di tahun 2021 mencapai 736,47 miliar rupiah.

#### *4.3.4. Informasi dan Komunikasi*

Berbeda dengan 3 sektor sebelumnya, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Hal ini ditunjukkan dari perolehan angka awal di tahun 2019 yaitu 4.369,73 kemudian naik menjadi 4.836,16, dan di tahun 2021 terus meningkat hingga 4.951,19. Kenaikan yang terjadi ini diduga dipengaruhi oleh adanya peningkatan signifikan pada penggunaan fasilitas online dalam pekerjaan dan pendidikan yang sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi.

#### *4.3.5. Jasa Pendidikan*

Sama seperti pada sektor informasi dan komunikasi, pada sektor jasa pendidikan terjadi pula kenaikan di setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2019 di angka 2.377,24 miliar rupiah, lalu naik ke angka 2.451,12 di tahun 2020, dan tahun 2021 mencapai 2.480,20 miliar rupiah.

#### *4.3.6. Jasa Perusahaan*

Sektor ini mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019 hingga 2021, dimulai dengan angka 78,93 di tahun 2019, kemudian turun menjadi 74,74 di tahun 2020, akan tetapi naik kembali menjadi 76,38 di tahun 2021.

#### *4.3.7. Jasa Lainnya*

Sektor ini juga mengalami penurunan dan peningkatan di rentang tahun 2019 sampai dengan 2021. Angka berawal dari 78,93 di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan ke 74,74 miliar rupiah, lalu naik kembali di tahun 2021 pada angka 76,38.

### **4.4. Analisis SWOT pada Sektor Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara**

Selanjutnya, pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 ditunjukkan hasil analisis SWOT pada sektor ekonomi kreatif Sulawesi Utara, di mana terlihat apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi kedua sektor ini khususnya di daerah Sulut. Bagian dari analisis SWOT ini telah diuraikan juga pada bagian 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.2: Analisis SWOT Sektor Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
Adanya dorongan yang kuat berupa kemauan/semangat untuk bangkit lagi dari kondisi saat ini	Masih rendahnya penguasaan teknologi, keterampilan teknis dan kompetensi.
UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.	Kapasitas produksi bahan baku lokal cenderung masih rendah
UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya.	Usaha cenderung mudah tutup
Umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif kecil	Mudahnya kompetitor luar masuk ke Sulut
Adanya digital <i>marketing</i> yang sementara dikembangkan antara lain: <i>cashless payment</i> , klik kios, dan antar jo.	Daya respons terhadap perubahan pasar masih sangat rendah.
Karakteristik masyarakat Sulawesi Utara yang terbuka terhadap perkembangan dan kesediaan menerima hal-hal yang baru.	UMKM Sulut diperhadapkan pada persoalan legalitas usaha.
	Sifat usaha yang belum mencapai skala usaha yang ekonomis.
	Pengelolaan usaha masih dengan cara yang sederhana dan tidak manajerial.
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>
Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	Daya respon terhadap perubahan pasar masih sangat rendah.
Tersedianya fasilitas UPTD Balai Diklat UMKM.	UMKM Sulut diperhadapkan pada persoalan legalitas usaha.
Tersedianya fasilitas bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.	Sifat usaha yang belum mencapai skala usaha yang ekonomis. Pengelolaan usaha masih dengan cara yang sederhana dan tidak manajerial.
Tersedianya fasilitas pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM).	
Tersedianya fasilitas promosi produk UMKM berupa Gedung <i>Paradise Promotion Product Centre</i> (P3C).	
Terbukanya akses ke Sulut melalui 1 Bandara Internasional (Sam Ratulangi Manado) dan 3 bandara perintis (Miangas, Melongguane, Sangihe).	Meningkatnya kompetisi lokal dan regional
Sebanyak 1.443 desa/kelurahan sudah dapat menerima sinyal 4G/LTE	
Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Likupang yang merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas	
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara di tahun 2021 yang berada di atas rata-rata nasional (72,29) yaitu sebesar 73,30 dan berada pada urutan ke-6 tertinggi secara nasional.	Rendahnya pinjaman dari perbankan untuk membiayai usaha.

...(berlanjut pada halaman berikutnya)



Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
<p>Sulut mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,62%.</p>	<p>Covid-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara global, pandemik masih berlangsung</li> <li>• Masyarakat masih abai terhadap Protokol Kesehatan (Prokes)</li> <li>• Pengawasan terhadap Protokol Kesehatan masih rendah (baik pemerintah maupun pelaku usaha UMKM)</li> <li>• Tempat usaha masih banyak yang belum menerapkan Protokol Kesehatan secara disiplin.</li> </ul>
	<p>Sosial ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2021 (4,16%) masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Sulut di tahun 2019 yang mencapai 5,65 %.</li> <li>• Tingkat kemiskinan di akhir tahun 2021 yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 7,36% dan rasio gini 0,359%.</li> <li>• Tingkat pendidikan rumah tangga miskin masih sangat rendah, di mana yang tidak tamat SD mencapai 22,21%, SD hanya sebanyak 38,69 %, dan SMP hanya sebanyak 20,91%.</li> <li>• Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 yang masih cukup tinggi, yakni mencapai 7,06%.</li> <li>• PDRB tahun 2021 yang masih rendah, hanya mencapai Rp.91,790,93 dalam harga konstan.</li> <li>• Ketidakeimbangan antara rata-rata upah di sektor informal (Rp 1.737.040) dibandingkan dengan sektor formal (Rp 3.124.581)</li> <li>• Masih rendahnya pinjaman UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada bank umum (2020) yang hanya mencapai Rp126.231.126.185.539 atau hanya 27,19 % dari total pinjaman UMKM</li> <li>• Belum terciptanya ekosistem UMKM dengan lembaga keuangan (LK)</li> <li>• Masih banyak desa/kelurahan yang belum menikmati internet dengan stabil (43 desa/kelurahan).</li> <li>• Belum meratanya PDRB Sulut, di mana PDRB masih terpusat pada beberapa daerah tertentu seperti Manado, Minahasa, Bitung dan Minahasa Utara.</li> </ul>

...(berlanjut pada halaman berikutnya)

Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
	Kelembagaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya pemahaman teknis pemeriksaan kelembagaan dan UMKM bagi aparaturnya pembina kabupaten/kota di Sulawesi Utara.</li> <li>• Terbatasnya kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi untuk pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.</li> <li>• Kurangnya pemahaman teknis tentang aturan-aturan berkaitan dengan pengawasan terhadap UMKM.</li> <li>• Koordinasi antar-dinas terkait masih kurang atau belum bersinergi (terlihat dari adanya perbedaan data jumlah UMKM).</li> <li>• Sistem birokrasi yang masih rumit dan belum berbasis digital.</li> <li>• Belum adanya Rencana Strategis (RENSTRA) 5 tahun ke depan untuk Pengembangan Pariwisata &amp; Ekonomi Kreatif Sulut.</li> </ul>

Sumber: Diolah penulis

Tabel 4.3: Matriks Alternatif Hal SWOT

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p><i>Strengths</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dorongan yang kuat berupa kemauan/semangat untuk bangkit lagi dari kondisi saat ini</li> <li>2. UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya.</li> <li>4. Umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif kecil</li> <li>5. Adanya digital <i>marketing</i> yang sementara dikembangkan antara lain: <i>cashless payment</i>, klik kios, dan antar jo.</li> <li>6. Karakteristik masyarakat Sulawesi Utara yang terbuka terhadap perkembangan dan kesediaan menerima hal-hal yang baru.</li> </ol>	<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya penguasaan teknologi, keterampilan teknis dan kompetensi.</li> <li>2. Kapasitas produksi bahan baku lokal cenderung masih rendah</li> <li>3. Usaha cenderung mudah tutup</li> <li>4. Mudahnya kompetitor luar masuk ke Sulut</li> <li>5. Daya respons terhadap perubahan pasar masih sangat rendah.</li> <li>6. UMKM Sulut diperhadapkan pada persoalan legalitas usaha.</li> <li>7. Sifat usaha yang belum mencapai skala usaha yang ekonomis.</li> <li>8. Pengelolaan usaha masih dengan cara yang sederhana dan tidak manajerial.</li> </ol>
--	---	--

...(berlanjut pada halaman berikutnya)

Opportunities	Hal S-O	Hal W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).</li> <li>2. Tersedianya fasilitas UPTD Balai Diklat UMKM.</li> <li>3. Tersedianya fasilitas bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.</li> <li>4. Tersedianya fasilitas pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM).</li> <li>5. Tersedianya fasilitas promosi produk UMKM berupa Gedung <i>Paradise Promotion Product Centre</i> (P3C).</li> <li>6. Terbukanya akses ke Sulut melalui 1 Bandara International (Sam Ratulangi Manado) dan 3 bandara perintis (Miangas, Melongguane, Sangihe)</li> <li>7. Sebanyak 1.443 desa/kelurahan sudah dapat menerima sinyal 4G/LTE</li> <li>8. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Likupang yang merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas</li> <li>9. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara di tahun 2021 yang berada diatas rata-rata nasional (72,29) yaitu sebesar 73,30 dan berada pada urutan ke-6 tertinggi secara nasional.</li> <li>10. Sulut mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,62%.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah mengadakan pelatihan ekonomi kreatif 3 bulan sekali berkolaborasi dengan perguruan tinggi (S1, O1, O2).</li> <li>2. Meningkatkan promosi produk ekraf melalui fasilitas pemerintah seperti Gedung, Bandara, KEK, dll (S2, O5, O6, O7)</li> <li>3. Peningkatan kapasitas bisnis melalui pinjaman KUR (S4, O3, O4)</li> <li>4. Mengoptimalkan kualitas jaringan internet di seluruh area Sulut untuk peningkatan penjualan (S5, O7)</li> <li>5. Pemerintah menyelenggarakan kompetisi inovasi produk baru ekraf dengan hadiah berupa modal kerja (S6, O9, O10)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku ekraf memanfaatkan fasilitas yang tersedia dari pemerintah untuk peningkatan penguasaan teknologi, keterampilan teknis dan kompetensi (W1, O2)</li> <li>2. Pelaku ekraf memanfaatkan fasilitas pinjaman untuk mengoptimalkan stok bahan baku (W2, O1, O2, O3, O4)</li> <li>3. Pelaku ekraf memperluas pasar dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan eksternal (W3, O3, O4, O5)</li> <li>4. Meningkatkan kualitas produk &amp; jasa ekraf agar dapat bersaing dengan lebih kompetitif dengan produk luar (W4, O2, O3, O4, O5)</li> <li>5. Pelaku ekraf secara rutin harus terus mengikuti <i>update</i> perkembangan pasar baik melalui media massa, media cetak ataupun media sosial (W5, O2, O3).</li> <li>6. Pelaku ekraf harus memanfaatkan fasilitas pelayanan publik untuk pengurusan legalitas usaha (W6, O1)</li> <li>7. Mengikuti pelatihan secara reguler tentang pengelolaan usaha secara manajerial untuk membuka wawasan dan kompetensi pelaku usaha ekraf (W7, W8, O2, O3, O4)</li> </ol>

...(berlanjut pada halaman berikutnya)

Threats	Hal S-T	Hal W-T
<p>1. Masih minimnya SDM yang andal</p> <p>2. Meningkatnya kompetisi lokal</p> <p>3. Meningkatnya kompetisi lokal dan regional</p> <p>4. Rendahnya pinjaman dari perbankan untuk membiayai usaha.</p> <p>5. Covid-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara global, pandemik masih berlangsung</li> <li>- Masyarakat masih abai terhadap Protokol Kesehatan (Prokes)</li> <li>- Pengawasan terhadap Protokol Kesehatan masih rendah (baik pemerintah maupun pelaku usaha UMKM)</li> <li>- Tempat usaha masih banyak yang belum menerapkan Protokol Kesehatan secara disiplin.</li> </ul> <p>6. Sosial ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2021 (4,16%) masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Sulut di tahun 2019 yang mencapai 5,65 %.</li> <li>- Tingkat kemiskinan di akhir tahun 2021 yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 7,36% dan rasio gini 0,359%.</li> <li>- Tingkat pendidikan rumah tangga miskin masih sangat rendah, di mana yang tidak tamat SD mencapai 22,21%, SD hanya sebanyak 38,69 %, dan SMP hanya sebanyak 20,91%</li> <li>- Alokasi anggaran dari pemerintah untuk pengembangan ekraf sangat tidak memadai</li> </ul> <p>7. Ekraf belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Sulut</p> <p>8. Belum adanya rencana induk pengembangan ekraf di Sulut</p>	<p>1. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan, asosiasi, dan pemerintah dalam membuat suatu program nyata agar dapat dihasilkan pelaku ekraf yang berkualitas dengan motivasi yang kuat, dan berdaya saing tinggi, dapat berupa pelatihan, seminar, kunjungan tempat usaha, dll. (S1, T1, T2, T3, T7)</p> <p>2. Membuat produk &amp; jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau <i>consumable</i> (S2, T2, T3)</p> <p>3. Membuat inovasi produk/jasa ekraf yang berkualitas, berciri khas lokal yang dapat meningkatkan cinta konsumen pada produk lokal. <i>Branding</i> lokal, kualitas internasional (S3, T2, T3)</p> <p>4. Membuat suatu produk/jasa kolaborasi bersama antarpelaku ekraf memanfaatkan fasilitas yang tersedia dari pemerintah (S4, T2, T3, T4, T7)</p> <p>5. Pelaku ekraf dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan media pemasaran secara digital yang ada (S5, T5, T6, T7)</p> <p>6. Membuat sosialisasi rutin ke masyarakat tentang aplikasi atau media digital <i>marketing</i> yang tersedia melalui media massa, media cetak, dan media sosial. Bekerja sama antara pelaku usaha ekraf dan pemerintah (S5, T5, T6, T7)</p> <p>7. Pemerintah meningkatkan pembangunan sekolah seperti SMK, membuat pelatihan berkelanjutan secara gratis tentang kompetensi praktis (seperti menjahit, membuat kue, dll) bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan yang tidak bersekolah (S6, T6, T7)</p> <p>8. Pemerintah harus mengalokasikan dana pengembangan ekraf secara memadai (S1, S2, S3, S4, S5, S6, T6, T7, T8)</p>	<p>1. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan, asosiasi, dan pemerintah dalam membuat suatu program nyata agar dapat dihasilkan pelaku ekraf yang berkualitas dengan motivasi yang kuat, dan berdaya saing tinggi, dapat berupa pelatihan, seminar, kunjungan tempat usaha, dll. (W1, W2, T1, T2, T3)</p> <p>2. Pemerintah menyelenggarakan kompetisi inovasi produk baru ekraf dengan hadiah berupa beasiswa pendidikan dan modal usaha (W1, W4, T1, T6)</p>

Sumber: Diolah penulis

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, hambatan dan ekspektasi menggunakan pendekatan *Tourism Satellite Account* (TSA) dan analisis SWOT serta untuk menjawab pokok permasalahan kajian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. *Supply* produk/jasa sektor pariwisata yang masih dapat dioptimalkan oleh UMKM Sulut ada sebesar Rp 10.872 triliun (33,61%).
2. Sinergitas antara pemerintah, UMKM, masyarakat dan institusi Pendidikan dapat meningkatkan kapasitas *supply* pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut.
3. Sektor pariwisata akan menjadi penyumbang penyerapan tenaga terbesar di Sulut ke depannya.
4. Tidak ditemukan adanya rencana induk pengembangan yang disusun Pemerintah Sulut untuk sektor ekonomi kreatif.
5. Ditemukan adanya permasalahan dalam legalitas, permodalan, pemasaran, kualitas produk, dan keterampilan manajerial pada UMKM sektor ekonomi kreatif yang menghambat pengembangan sektor.
6. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk menekan penyebaran Covid-19.

Dengan mengacu pada hasil kajian dan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

### a. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan dan perawatan infrastruktur ke lokasi objek wisata yang ada serta akses jalan ke lokasi pelaku usaha ekonomi kreatif juga sebaiknya mempercepat pembangunan KEK Likupang (kapasitas *supply* termanfaatkan). Selanjutnya perlu ada pembatasan akan pembukaan gerai-gerai internasional seperti *Starbucks*, dll hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja sehingga tidak mematikan gerai lokal yang ada dan perlu adanya dukungan penuh berfokus pada pengembangan desa wisata. Di sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan sektor parekras Sulut sebaiknya dilakukan pelatihan secara rutin kepada UMKM seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, pemandu wisata, pemasaran dan manajerial. Selain itu, perlu dilakukan literasi secara terus-menerus kepada UMKM tentang manfaat dan pentingnya legalitas usaha dengan melibatkan lembaga keuangan dan perguruan tinggi. Berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, sangat dianjurkan agar pemerintah segera menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Sulut.

### b. Bagi UMKM

UMKM sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Pemerintah, baik itu pelatihan-pelatihan, pinjaman modal (perbankan atau non-perbankan), pelayanan publik, ataupun media promosi untuk peningkatan penguasaan teknologi, keterampilan teknis, kompetensi, dan pengurusan legalitas usaha. UMKM juga dianjurkan untuk membuat inovasi produk/jasa ekraf yang berciri khas lokal dengan kualitas internasional yang dapat meningkatkan cinta konsumen pada produk lokal.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dianjurkan untuk memprioritaskan *spot* wisata dan produk/jasa ekraf di Sulut sebagai pilihan pertama dalam berwisata dan berpartisipasi aktif dalam mempromosikan *spot* wisata dan produk ekraf Sulut khususnya melalui media digital dan sosial media. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, institusi pendidikan dan asosiasi desa wisata Indonesia bersama-sama membangun tempat tinggal yang berpotensi dijadikan sebagai desa wisata. Masyarakat diharapkan terus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang bebas Covid-19, bebas sampah, berpartisipasi aktif melestarikan alam dan menjaga situasi aman dan nyaman di daerah Sulut dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2022a). *Perkembangan Pariwisata Sulawesi Utara Januari 2022* (No.18/03/71 Thn. XVI).  
<https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/895/perkembangan-pariwisata-sulawesi-utara-januari-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2022b). *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022*.  
<https://sulut.bps.go.id/publication/2022/02/25/58020909848743d283b68afa/provinsi-sulawesi-utara-dalam-angka-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021, 6 Juli). *Tourism Satellite Account Indonesia 2016-2019*.  
<https://www.bps.go.id/publication/2021/07/06/6f2f99f9fdf5e645773c906b/tourism-satellite-account-indonesia-2016-2019.html>
- The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. (2010). *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008* (ST/ESA/STAT/SER.F/80/Rev.1). United Nations publication.  
[https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf\\_80rev1e.pdf](https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf)
- Dua, M. (2008). *Filsafat ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Kanisius Yogyakarta.
- Hasan, M., Noercahyo, A., Rani, A. E., Salshabilla, N. A., & Izzati, S. N. (2021). Pengembangan ekonomi kreatif sektor umkm Di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 125-138. <https://doi.org/10.26740/jepk.v9n2.p125-138>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024*. <https://jdih.kemendparekraf.go.id/katalog-664-Peraturan%20Menteri>

- Luthfia, D. A. (2021, February 17). Penurunan Devisa Sektor Pariwisata Akibat Pandemi COVID-19. *Kumparan*. Retrieved June, 18, 2021, from <https://kumparan.com/dianiraal17/penurunan-devisa-sektor-pariwisata-akibat-pandemi-covid-19-1vC5uRy4Fi0>
- Noor, J. (2011). *Metodelogi penelitian*. Kencana Prenamedia Group.
- Obst, C. (2018). Measuring Sustainable Tourism: Proposals for estimating Tourism Direct GDP with limited data. *UNWTO*. Retrieved July, 7, 2021, from [https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported\\_images/49465/mst\\_research\\_paper\\_measuring\\_tdgdp.pdf](https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49465/mst_research_paper_measuring_tdgdp.pdf)
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D., Amaliyah, I., & Ardana, A. K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1).  
<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/download/1/1/>
- Widarsi, P. S. (2019, December 2). Jokowi Kembangkan Destinasi Wisata Indonesia, Manado Masuk Dalam Program 10 Bali Baru. *TribunManadoTravel.com*. Retrieved June, 18, 2021, from <https://tribunmanadotravel.tribunnews.com/2019/12/02/jokowi-kembangkan-destinasi-wisata-indonesia-manado-masuk-dalam-program-10-bali-baru?page=all>